

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilihan umum legislatif telah dilaksanakan pada 9 april 2014 lalu oleh Negara Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi. Pemilihan legislatif yang meliputi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sesuai dengan UUD 1945. Negara demokrasi identik dengan kembalinya hak rakyat untuk menentukan pemimpin secara bebas, aktif, tanpa ada paksaan dari manapun. Tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah jika masyarakat aktif berpartisipasi politik penyelenggaraan pemilu. Masyarakat (Warga negara) penentu berhasil atau tidaknya dalam proses pemilu. Karena kekuatan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan (Dani Wahyu Rahma, 2010). Berkenaan dengan Partisipasi Politik dalam pemilu diperlukan adanya: (1) Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, (2) Pengembangan intelektual dan partisipatoris, (3) Pengembangan karakter dan sikap mental tertentu, (4) Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi.

Partisipasi politik warga dalam kaitan ini bukan hanya datang dari kalangan masyarakat pada umumnya, tetapi juga golongan pemuda, Salah satunya adalah kader *Muhammadiyah* yakni yang tergabung dalam lintas ortom *Angkatan Muda Muhammadiyah*. Sebagai kader muda harapan bangsa dan perserikatan, Muhammadiyah mempunyai kontribusi besar melalui partisipasi politiknya dalam proses berdemokrasi. Gagasan dan pemikiran kaum intelektual sangat berpengaruh

bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sesuai yang telah disampaikan oleh suwarno (2010: 97) mengungkapkan :

“Muhammadiyah sebagai bagian dari umat islam dan bangsa Indonesia, sejatinya, wacana dan paradigma mengenai budaya politik yang kondusif bagi keberlangsungan proses berdemokrasi politik bangsa ini. Hal ini lantaran Muhammadiyah yang lahir 30 tahun (1912) lebih dulu daripada Negara-bangsa ini (*naton-state*) Indonesia ini telah mengalami perjalanan sejarah politik yang matang dalam relasinya dengan Negara (baca: kekuasaan yang memerintah Negara), sehingga Muhammadiyah mempunyai rambu-rambu politik yang jelas. Kendatipun Muhammadiyah merupakan organisasi yang lebih bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan pendidikan, serta bukan partai politik, namun kontribusi politik Muhammadiyah disepanjang sejarah Indonesia modern tidak kecil. Kontribusi Muhammadiyah tersebut terutama dipancarkan lewat keterlibatan elit tokoh pimpinannya. Dapat disebut antara lain : K.H. Ahmad Dahlan pada masa penjajahan Belanda, K.H. Mas Mansyur dan Haji rasul pada pendudukan jepang, K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Sudirman, Mr. Kasman Singodimejo, Prof HAMKA, K.H A.R. Fachruddin, Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Prof.Dr. A. Syafi’i Maarif. Semua tokoh tersebut telah berkontribusi politik kepada Negara dengan berpegang teguh pada budaya poltik Muhammadiyah.”

Data diatas menunjukkan adanya partisipasi atau pengaruh besar para tokoh Muhammadiyah terhadap perjalanan politik di Indonesia. Menunjuk pada data tersebut maka Angkatan Muda Muhammadiyah (lintas ortom) yang merupakan kaum muda bagian dari muhammadiyah yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah harus memiliki sikap progresif dan peduli terhadap realitas kebangsaan. Hal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan, Budiman, Syahganda N (dalam tabloid kauman edisi 2, 2011:5-7):

“Kaum muda harus bisa lebih bergerak membumi dan peduli terhadap realitas kebangsaan, mempunyai karakter kuat, meyakinkan, progresif, berfikir kreatif dalam melanjutkan kepemimpinan bangsa,dan yang lebih penting tidak terjebak dalam romantisme sejarah. Kaum muda harus menyeimbangkan antara pikiran-pikiran local dengan global”

Realita yang terjadi saat ini Angkatan Muda Muhammadiyah masih enggan berpolitik, bersikap apatis, hal tersebut disampaikan oleh Saleh P Daulay (2010)

“*pemuda muhammadiyah tidak akan bermain-main lagi dengan urusan politik, saatnya kami menyusun barisan untuk mengurus umat yang membutuhkan uluran tangan*”. Keadaan tersebut dipersulit dengan keputusan pimpinan persyarikatan, pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah dilarang berpolitik sebagaimana adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/1.0/B/2013, yaitu :

“Pimpinan persyarikatan, pimpinan unsur pembantu pimpinan persyarikatan, pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pengurus Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan tenaga tetap/tidak tetap dilingkungan persyarikatan Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI/DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota pimpinan persyarikatan dan/atau tenaga tetap/tidak di AUM, baik yang bersangkutan berhasil atau tidak dalam pencalonan tersebut”

Adanya Surat Keputusan Pimpinan Pusat tersebut membatasi gerak berpolitik lebih jauh membuat para kader angkatan muda Muhammadiyah enggan untuk lebih jauh masuk kedalam politik praktis.

Dari berbagai permasalahan partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah (lintas ortom) yang disebabkan oleh faktor intern maupun extern mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait **“partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilihan umum legislatif diponorogo tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo

2. Bagaimanakah piramida partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu legislatif diponorogo tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo
3. Bagaimanakah sifat partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu legislatif diponorogo tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo
4. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif diponorogo tahun 2014 di Kabupaten Ponorogo

### **1.3 BATASAN KONSEP + VARIABEL**

#### **1.3.1 Batasan Konsep**

##### **1.3.1.1 Konsep Angkatan Muda Muhammadiyah**

Angkatan Muda Muhammadiyah merupakan lintas ortom yang terdiri dari (Pemuda Muhammadiyah, Nasyyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Hizbul Wathan) merupakan sayap muhammadiyah sebagai wadah membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah.

##### **1.3.1.2 Konsep partisipasi politik**

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam proses politik yang berlangsung baik dengan kesadaran pribadi maupun dorongan dari orang lain. Dengan cara memilih pemimpin Negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan menjadi kader partai politik.



#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk Mengetahui Partisipasi Politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 yang kemudian lebih di verivikasi kedalam sub-pembahasan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui Partisipasi Politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Ponorogo.
- 1.4.2 Untuk mengetahui piramida partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu legislatif diponorogo tahun 2014.
- 1.4.3 Untuk mengetahui sifat partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pemilu legislatif diponorogo tahun 2014
- 1.4.4 Untuk mengetahui Faktor mempengaruhi partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif diponorogo tahun 2014.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Adapun kegunaan/manfaat penelitian ini yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut;

##### **1.5.1 Bagi diri sendiri:**

- 1.5.1.1 Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif.
- 1.5.1.2 Untuk lebih memahami sejauh mana partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Ponorogo.

1.5.1.3 Menambah pengetahuan dan informasi terkait Faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah Ponorogo dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Kabupaten Ponorogo.

### **1.5.2 Bagi Mahasiswa**

1.5.2.1 Memberikan referensi terkait partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah dalam pemilu legislatif.

1.5.2.2 Memberikan kesempatan bagi peneliti lanjutan untuk bidang penelitian yang sama.

### **1.5.3 Bagi Masyarakat**

1.5.3.1 Memberikan wawasan baru kusunya dibidang politik mengingat masyarakat disini bisa jadi komentator dan monitoring dalam kancah perpolitikan dikabupaten ponorogo.

1.5.3.2 Memberikan informasi kepada masyarakat bentuk-bentuk partisipasi politik Angkatan Muda Muhammadiyah dan faktor yang mempengaruhi.

### **1.5.4 Bagi Angkatan Muda Muhammadiyah**

1.5.4.1 Menambah legitimasi dimasyarakat terkait partisipasi Angkatan Muda Muhammadiyah dalam dunia politik.

1.5.4.2 Menambah wawasan terkait pentingnya dilakukan partisipasi politik dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah dalam kebangsaan.